

# MAKALAH

## DINAMIKA KEKUATAN MILITER INDONESIA *“Dari bisnis hingga politik Orde Baru ke Era Reformasi”*

### BAB I

#### PENDAHULUAN

##### A. Latar Belakang

Bahwa sesungguhnya Militer merupakan sebuah kekuatan politik yang mewarnai pertarungan kekuatan politik dalam proses politik yang terjadi di Indonesia. Sejarah mencatat bahwa militer mempunyai masa dimana sebagai kekuatan politik pengaruhnya sangat besar di dalam proses politik yang terjadi. Beberapa waktu yang lalu dapat dikatakan pengaruh militer sangatlah besar dalam menentukan arah kebijakan politik dan juga mengatur arah kehidupan masyarakat. Militer menjelma sebagai kekuatan politik yang mendukung dan mempertahankan kekuasaan penguasa, bertujuan untuk menjaga, menciptakan dan mempertahankan stabilitas politik. Keterlibatan militer dalam politik di Indonesia ini nantinya menunjukkan identitas yang berbeda antara militer di Indonesia dengan kebanyakan militer yang di negara-negara lain.

Fenomena politik militer di Indonesia dipahami sebagai fenomena melemahnya fungsi sipil dikarenakan krisis ekonomi yang mengharuskan Negara bertindak cepat dalam pemulihan ekonomi sehingga perlu adanya aliansi strategis dengan militer. Dalam konteks aliansi tersebut cenderung memperkuat peran militer di era Orde Baru, maupun Era Reformasi saat ini. Regulasi politik dengan masuknya militer ke wilayah politik praktis secara terang-terangan sudah menguasai perpolitikan di Indonesia.

Namun demikian, menurut pengajar Ilmu Politik Universitas Airlangga, Haryadi dalam konteks demokrasi langsung, kualitas kekuasaan terpilih adalah cerminan kualitas sebagian

pemilihnya. Di era reformasi saat ini hadirnya Soesilo Bambang Yudhoyono dalam kancah politik nasional merupakan wujud belum hilangnya peran militer di dunia politik. Masyarakat setidaknya masih membutuhkan figur kepemimpinan ala militer sehingga pada periode 2004-2009 hingga 2009-2014 Soesilo Bambang Yudhoyono begitu mudahnya melenggang ke arena politik dan tampil sebagai pemimpin bangsa ini.

Makalah ini mencoba mengulas tentang protes kelompok sipil terhadap fungsi ganda militer sehingga diasumsikan bahwa sebagian kalangan sipil masih meragukan apakah militer betul-betul akan menarik diri dari politik dan berkomitmen pada profesionalisme atautkah masih menghendaki adanya peran militer dibidang politik. Sebab kalangan sipil masih melihat; *Pertama*, berbagai kriteria obyektif militer Indonesia belum pernah dianggap betul-betul profesional. *Kedua*, ada warisan sejarah pahit masa lalu di mana militer terlibat mendalam dalam politik dan kegiatan bisnis. Dengan demikian, memungkinkan militer tidak fokus pada tugas utamanya, sehingga tidak mendorong mereka ke arah profesionalisme.

Dalam aspek profesionalisme militer timbul pertanyaan besar tentang keraguan publik bahwa apakah militer Indonesia bisa betul-betul profesional dengan melepaskan diri sepenuhnya dari politik dan bisnis. Apalagi kita dihadapkan pada situasi dan kondisi Indonesia saat ini yang sedang menghadapi pesta demokrasi yakni Pemilihan Presiden pada tanggal 9 Juli 2014 yang menentukan peran sipil atau militer bagi masa depan bangsa. Walaupun kita ketahui bersama bahwa militer tidak lagi aktif di dunia politik berdasarkan konsep Dwi Fungsi seperti di era Orde Baru. Namun jika kita tinjau dari segi sejarah, maka sangatlah tidak mungkin apabila militer hanya akan duduk pasif untuk menyaksikan berlangsungnya pesta demokrasi.

Hal ini kemudian berimplikasi terhadap kekuasaan dan keterlibatan militer pada pemilu 2014 dalam percaturan politik guna menjalankan peran ganda militer sebagai aplikasi Dwi Fungsi ABRI. Regulasi politik mengindikasikan munculnya elit-elit militer dalam pemilihan presiden periode 2014 – 2019 untuk meningkatkan stabilitas ekonomi dan politik. Dalam konteks peran penting militer dalam menciptakan kekuasaan politik demi mewujudkan kepentingan ekonomi

politik individu-individu di militer yang merupakan perwira-perwira militer ataupun suatu kelompok bentukan militer.

Makalah ini mencoba menelusuri keruntuhan kontrol sipil yang objektif dalam meninggalkan polemik besar terhadap peran sipil di pemerintahan dan relasi politik antara sipil dan militer. Dalam penulisan makalah ini, penulis melihat bahwa munculnya Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden periode 2014-2019 merupakan upaya kembalinya elit-elit militer dalam pesta demokrasi. Hipotesis dasar menunjukkan sesungguhnya militer Indonesia tampaknya ingin mengembalikan kekuasaan dan memperluas partisipasinya di dunia politik. Sebab demokrasi telah mengembalikan intervensi militer dalam sistem politik. Dan selama kurun waktu ±15 tahun gerakan reformasi telah terlewat. Tuntutan akan adanya perubahan pun belumlah usai baik dari segi politis dan bisnis, serta menciptakan iklim demokratisasi di Indonesia dengan mewujudkan profesionalisme militer sebagai instrumen negara.

Hipotesis yang dikemukakan diatas diperkuat dengan pendapat yang dikemukakan oleh Finer dan Janowitz bahwa "militer secara sistematis mengembangkan keterkaitan yang erat dengan sejarah perkembangan bangsa serta arah evolusi Negara". Hal ini dilakukan dengan mengombinasikan prinsip hak sejarah (*birthright principle*) dan prinsip kompetensi (*competence principle*). Prinsip hak sejarah didasarkan pada suatu interpretasi sejarah bahwa militer berperan besar dalam sejarah pembentukan bangsa dan telah melakukan pengorbanan tidak terhingga untuk membentuk dan mempertahankan negara. Sedangkan prinsip kompetensi didasarkan pada ide bahwa militer merupakan institusi terbaik yang dimiliki negara untuk mempertahankan dan mencapai kepentingan nasional bangsa. Faktor utama yang mendasari penilaian ini adalah wacana tentang ketidakmampuan institusi sipil untuk mengelola negara, ditandai dengan merebaknya berbagai krisis nasional.

Merujuk pada hipotesis tentang intervensi militer menunjukkan adanya kekuatan militer dalam bidang politik di era reformasi. Maka asumsi dasar berangkat dari pertanyaan yang perlu untuk dikaji sebagai bentuk upaya untuk menelisik persoalan apa saja yang menghadirkan

keterlibatan militer dalam dunia politik sebagai suatu kekuatan politik yang tidak bisa dipisahkan dari factor sejarah.

## **B. Pokok Masalah.**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, penulis mencoba mengurai pertanyaan-pertanyaan penting tentang peran militer sehingga dapat mengidentifikasi kekuatan politik militer di era reformasi dan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut secara sistematis. Sehingga memunculkan penggambaran, penjelasan, analisis dan penilaian yang sistematis mengenai kekuatan politik militer dan kekuasaan militer yang sesungguhnya.

Nah! dengan dasar tersebut, muncul pertanyaan-pertanyaan yang tak terelakan manakala orang mulai merefleksikan secara kritis praktik-praktik dan peran penting militer dalam politik pemerintahan di Indonesia. Ketika memandang kekuatan-kekuatan sebuah institusi baik secara sosial maupun politik mereka hanya karena adanya perubahan situasi dan kondisi, maka pertanyaan dalam penulisan ini adalah mengapa militer mengambil bentuk peran politik di era reformasi?

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORI**

Untuk menjawab pertanyaan yang dikemukakan pada pokok permasalahan diatas maka perlu kiranya penulis menggunakan pendekatan teori untuk mengkaji peran militer di era reformasi, dan teori yang digunakan sebagai pendekatan teoritis dalam makalah ini adalah (a). Profesionalisme Militer, (b). Kontrol Sipil yang Obyektif dan Kontrol Sipil yang Subyektif serta Intervensi Militer. Pendekatan teoritis ini digunakan untuk dapat memahami mengapa peran militer begitu kuat di era reformasi saat ini. Pendekatan-pendekatan teori dimaksud antara lain:

#### **A. Profesionalisme Militer**

Meminjam ungkapan teori profesionalisme militer yang diungkapkan Sundhaussen yang menyatakan bahwa suatu komitmen kepada profesionalisme yang akan mencegah golongan militer untuk memasuki bidang politik, yang mungkin relevan dengan sistem politik yang relatif sudah tinggi tingkat perkembangannya dan diferensiasinya, dimana profesionalisme orang-orang politik menjamin adanya kestabilan dan ketertiban politik. Di negara-negara baru, dimana efisiensi dan performa golongan militer mungkin tidak dapat ditandingi oleh norma yang serupa dalam bidang profesi yang lainnya. Terutama oleh orang-orang politik maka profesionalisme militer yang tingkatnya tinggi lebih besar kemungkinannya untuk mengancam prinsip supremasi sipil dari pada menopangnya.<sup>1</sup>

Apakah orang-orang militer akan lebih berprestasi dari pada orang-orang politik apabila mereka telah memegang kontrol atas politik dan ekonomi, dan banyak sekali kesangsian yang telah dikemukakan dalam perdebatan mengenai prestasi militer dibidang politik dan ekonomi merupakan soal yang lain sama sekali. Dalam konteks meneliti motif-motif bagi intervensi militer yang penting sebenarnya adalah apakah para perwira militer pada waktu mereka memutuskan untuk melakukan intervensi percaya bahwa mereka bisa berprestasi lebih baik dari

---

<sup>1</sup> ULF Sundhaussen, *Politik Militer Indonesia 1945-1967 : Menuju Dwifungsi ABRI*, Jakarta: LP3ES, 1998, hal 11

pada pemimpin sipil, dan bahwa mereka berkewajiban untuk memaksakan kepada masyarakat apa yang mereka anggap sebagai kemampuan mereka yang lebih baik.

Lain halnya dengan pandangan yang dikemukakan oleh Huntington tentara modern dibedakan dari tentara sebelum tahun 1789, sebagai suatu kelompok korporasi profesional;

*Pertama prajurit profesional*, yang merupakan satu kelas sosial yang baru muncul berdasarkan keahlian, Ideologi Korporatisme. Ciri-ciri variable yang dijumpai dalam lembaga militer modern baik dinegara maju maupun yang sedang berkembang, koporatisme dan idiologi jauh lebih penting.

*Kedua prajurit pretorian*, walaupun hanya sedikit para perwira militer yang memilih lapangan politik sebagai pekerjaannya, namun profesi militer dapat dijadikan sebagai landasan politik. Semakin tinggi kedudukan seorang perwira maka akan semakin bersifat politis, terutama pada situasi-situasi pretorian dan revolusioner, yang mungkin akan melibatkan semua organisasi militer dalam aksi politik. Dalam kondisi politik yang stabil hanya sedikit para perwira yang bersedia menggantikan profesi mereka dengan politik. Akan tetapi peranan kelompok kecil yang berbuat demikian itu sangat vital terhadap penjajakan hubungan sipil dan militer.

*Ketiga prajurit revolusioner*, sebagai alat revolusi, terutama sebelum dan selama perang revolusioner. Tentara revolusioner menunjukkan kecenderungan yang kuat untuk takluk dibawah pengaruh politik. Ketika revolusi berangsur-angsur melembaga, gerakan partai menjadi kekuasaan tertinggi dalam negara. Kecenderungan tentara revolusioner melakukan intervensi politik tidak pernah hilang seluruhnya.

## **B. Kontrol sipil yang Obyektif dan Kontrol sipil yang subyektif**

Teori ini apa yang Huntington sebut sebagai hubungan sipil dan militer yang “objektif”. Interaksi yang labil antara masyarakat dan orde politik menghasilkan hubungan sipil dan militer

yang “subjektif”.<sup>2</sup> Sebuah analisa subjektif dan objektif dari sebuah rezim. Lebih jauh Huntington melihat bahwa ada dua bentuk hubungan sipil militer.

*Pertama, kontrol sipil obyektif (Objective Civilian Control).* Istilah ini mengandung makna profesionalisme militer yang tinggi dan pengakuan dari pejabat militer akan batas-batas profesionalisme yang menjadi bidang mereka, subordinansi yang efektif dari militer kepada pemimpin politik yang membuat keputusan pokok tentang kebijakan luar negeri dan militer, pengakuan dan persetujuan dari pihak pemimpin politik tersebut atas kewewenangan profesional dan otonomi bagi militer, minimalisasi intervensi militer dalam politik dan minimalisasi intervensi politik dalam militer.<sup>3</sup>

*Kedua, kontrol sipil subyektif (subjective civilian control).* Bentuk kontrol ini adalah memaksimalkan kekuasaan sipil. Model ini bisa diartikan sebagai upaya meminimalkan kekuasaan militer dan memaksimalkan kekuasaan kelompok-kelompok sipil.<sup>4</sup>

### **C. Intervensi Militer**

Huntington lebih jauh dan tegas dalam mengemukakan hasil pengamatannya bahwa intervensi militer tidak disebabkan oleh faktor faktor yang berasal dari dalam tubuh militer, seperti kepentingan kelas, kepentingan perorangan atau individu, professionalism modern, kepentingan golongan (*korporatif*), kegagalan sistem. Namun menurut Huntington, golongan militer merebut peran non militer sebagai akibat tidak stabilnya sistem politik dan kegagalan pemimpin politik untuk menjamin ditaati norma dan proses politik. Cara-cara yang digunakan masing- masing kelompok, akan berbeda dan mencerminkan sifat dan kemampuannya yang khas.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup>. Samuel P. Huntington, *Prajurit dan Negara*, Terj. Deasy Sinaga (Jakarta:2003), hal. 87-92

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Larry Diamond dan Marc F. Plattner (ed), *Civil-Military Relations and Democracy*, terj Tri Wibowo Budi Santosa “Hubungan Sipil-Militer dan Konsolidasi Demokrasi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, hal 4, lihat juga Malik Haramain, *Gus Dur Militer dan Politik*, Yogyakarta: LkiS, 2004, hal 16

<sup>5</sup> Samuel P. Huntington, *The Soldier and the State: the Theory and Politics Civil – Military Relations*. Cambridge, Harvard University Press, 1957. Lihat Amos Perlmutter, *Militer dan Politik*. Jakarta: Rajawali Pers, cetakan kedua 2000, hal. VI.

Amos Perlmutter menyebut ada dua kondisi yang memberikan kesempatan bagi militer untuk melakukan intervensi;

*Pertama, kondisi social*, Suatu negara yang kondisi sosialnya lemah, maka kepentingan kelompok akan tersebar dalam frekuensi yang tinggi. Kalau struktur negara lemah maka institusi-institusi politik tidak berfungsi efektif dan dengan demikian kontrol sosial tidak efektif. Sebab saluran-saluran komunikasi terhambat, maka militer memiliki peluang untuk melakukan intervensinya.

*Kedua, kondisi politik*, Intervensi militer muncul dari persoalan-persoalan sipil. Dalam banyak kasus kembalinya sipil ke militer untuk mendapatkan dukungan ketika struktur politik sipil terfragmentasi dalam faksi-faksi politik dan ketika perangkat konstitusi tidak berjalan.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Amos Perlmutter, *Three Military and Politics and Modern Times*, terj. Sahat Simamora, 'Militer dan Politik', Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, hal 144-145

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Sejarah lahirnya Militer di dunia politik**

Perkembangan militer Indonesia adalah salah satu fenomena yang menarik untuk ditelusuri serta dianalisa berdasarkan perannya dalam suatu sistem sosial dan perpolitikan Indonesia. Menurut sejarahnya, militer di Indonesia mengalami berbagai masa yang fluktuatif dalam tumbuh kembangnya sebagai salah satu bagian dari kekuatan dominan yang ada di Indonesia.

Sejak pertama kali militer ikut menangani urusan sipil dalam kehidupan bernegara, memang telah muncul suatu indikasi bahwa nantinya kekuatan militer Indonesia akan memegang peranan yang penting pula dalam sejarah perpolitikan Indonesia, bahkan bersanding dengan kekuatan Soekarno maupun PKI.<sup>7</sup>

Indikasi ini bisa muncul sebagaimana yang dikemukakan oleh Huntington dan Finer bahwa penyebab paling penting dari intervensi militer dalam politik adalah sistem kebudayaan politik, struktur politik serta institusionalnya. Dengan demikian, peluang intervensi militer dalam perpolitikan Indonesia secara umum adalah besar, mengingat kondisi sistem budaya politik yang berlangsung saat itu masih pada level minimum dan tidak mampu membatasi kegiatan militer pada bidang non-politis saja.<sup>8</sup>

TNI sendiri telah terlibat dalam politik domestik sejak adanya revolusi. Semenjak demokrasi dipimpin golongan militer telah masuk ke dalam system politik Indonesia. Hal ini diindikasikan oleh adanya keberhasilan TNI memberantas PRRI yang membuat kekuatan dan wibawa TNI khususnya Angkatan Darat secara politis meningkat. kemudian hal itu diperkuat dengan adanya keadaan darurat perang ketika itu (SOB) dan konsepsi dwifungsi ABRI yang dicanangkan oleh Jenderal Nasution di tahun 1958 yang menyatakan bahwa golongan militer

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hal VI.

<sup>8</sup> Abdoel, Fattah. *Demiliterisasi Tentara; Pasang Surut Politik 1945-2004*. Yogyakarta: PT Lkis Pelangi Aksara 2005

tidak hanya berfungsi sebagai alat pertahanan negara tetapi juga berfungsi dalam kehidupan sipil (fungsi pemerintahan).<sup>9</sup>

Golongan militer tidak hanya aktif dalam dunia politik, administrasi, dan lingkungan diplomatik, mereka juga memainkan peran penting dalam perekonomian Negara. Sejak 1957 dimana perusahaan-perusahaan milik Belanda telah di nasionalisasikan pada 1958, para agen militer ditunjuk untuk mengelola usaha-usaha tersebut seperti pertanian, perhotelan, sarana transportasi, dan perusahaan dagang. Ini merupakan suatu yang disebut sebagai jalan tengah atau *The Army's Middle way* dimana ABRI selain merupakan kekuatan militer juga merupakan kekuatan sosial politik bahu membahu membantu perjuangan masyarakat.<sup>10</sup>

Pada masa Orde Baru sering terdengar ucapan pejabat publik atau tokoh masyarakat, khususnya dari kalangan militer, yang mengidentifikasi fungsi sosial politik TNI, sama tuanya dengan usia TNI itu sendiri. Juga, berbeda dengan banyak negara berkembang atau negara baru (yang lahir sesudah Perang Pasifik), terjunnya kekuatan militer di Indonesia di bidang politik, karena factor eksternal yang bersifat insidental. Lebih disebabkan oleh tuntutan di luar TNI itu sendiri ketimbang desakan dari dalam.<sup>11</sup>

Pada waktu itu, kebanyakan orang mengatakan, kegiatan politik TNI bukan merupakan reaksi terhadap kondisi tertentu di dalam negara kita (Indonesia), melainkan karena perkembangan keadaan politik itu sendiri. Artinya, justru situasi dan kondisi politik dalam negeri, mendorong tumbuh dan berkembangnya harapan masyarakat atas fungsi sosial politik ABRI. Tidak sedikit manusia Indonesia, waktu itu, mengatakan dwifungsi ABRI tidak mencerminkan politisasi ABRI. Inilah uniknya, dwifungsi ABRI, kata mereka, tidak dapat disamakan dengan pengalaman di berbagai negara lain, di mana angkatan bersenjata

---

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Lihat “*The Military Structure, Procedures, and Effects on Indonesian Society*” oleh Ulf Sundhaussen dalam Lucian Pye and Karl D. Jackson (eds.), *Political Power and Communications in Indonesia* (Berkeley : University of California Press, 1978 ), hal. 52-53

<sup>11</sup> *Op cit*, Huntington

memainkan peran politik, setelah memiliki kekuasaan tertentu. Alasannya, sejak lahirnya, ABRI sudah bersifat politik.<sup>12</sup>

Sejak kemerdekaan Indonesia pada 1945, militer Indonesia tidak lepas dari peranannya. TNI sendiri telah terlibat dalam politik domestik akibat doktrin dwifungsi ABRI sebagai 'jalan tengah' yang sudah dicanangkan sejak 1958 dan dengan diberlakukannya SOB membuat popularitas militer khususnya menanjak.<sup>13</sup>

Hal berlaku semakin kuat sejak demokrasi terpimpin ditandai dengan beberapa kursi dalam DPR gotong royong dikuasai oleh golongan militer mulai tahun 1959 yang artinya militer mulai memasuki dan berpartisipasi dalam pemerintahan.<sup>14</sup> Hal ini yang disebut oleh Huntington sebagai intervensi militer yang kemudian dimunculkan sebagai sebuah partisipasi militer, walaupun dalam pemerintahan mengalami semacam pasang surut sampai di tahun 1964 dan berlanjut sampai tahun 1965. Setelah 1965, lewat serangkaian peristiwa politik yang rumit, TNI menjadi suatu kekuatan politik yang mendominasi kehidupan politik di Indonesia.

## **B. Peran Militer di dunia Politik**

Walaupun TNI telah merumuskan lima peran dan misi strateginya yaitu; pertama, mempertahankan kedaulatan dan integritas Nasional dari ancaman luar. Kedua, menjaga keamanan dalam negeri terhadap ancaman dari dalam yang sifatnya mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Ketiga, turut serta dalam pembangunan nasional terutama diarahkan untuk aktif ikut meningkatkan kesejahteraan rakyat termasuk kegiatan bhakti ABRI.

Langkah konkritpun dimulai, untuk meninggalkan politik praktis bersamaan dengan reformasi internal yang menyeluruh di jajaran TNI, peran politik ini semakin mengecil setelah dihapusnya fraksi TNI dari Dewan Perwakilan Rakyat pada masa akhir parlemen 2004. Makin mengerdilnya peran militer dalam sektor politik di era reformasi ini merupakan upaya proses.

---

<sup>12</sup> Seperti yang dikutip dari Huntington, *Political Order...*, dalam Ulf Sandhaussen, *Politik Militer Indonesia 1945-1967 : Menuju Dwi Fungsi ABRI*, terjemahan. Hasan Basari, (Jakarta, Penerbit LP3ES, 1988), hal. 441-442

<sup>13</sup> *Loc cit*, Lucian Pye and Karl D

<sup>14</sup>

Alfred Stefan, dalam bukunya *Rethinking Military Politic*, mengatakan bahwa untuk mengukur apakah kontrol sipil atas militer efektif atau tidak adalah dengan mengamati sejauh mana pihak sipil mengurangi hak istimewa (*preogratif*) militer dan berapa jauh pihak militer mampu mempertahankan hak pereogratif.

Kontrol sipil-militer terhadap militer makin kuat setelah DPR meratifikasi Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI. Pengesahan RUU membuat otoritas militer yang sangat strategis mengalami degradasi yang luar biasa. Dalam pasal 39 tersebut menyebutkan pembatasan-pembatasan bagi prajurit TNI pada empat hal. Pertama, kegiatan menjadi anggota partai politik; kedua, kegiatan politik praktis. Ketiga, kegiatan bisnis. Keempat, kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya.

Dari empat poin tersebut, yang telak-telak memberikan pembatasan pada TNI adalah soal badget pertahanan, disitu disebutkan bahwa TNI tidak boleh berbisnis. Padahal semua memahami bahwa TNI tidak mampu mengandalkan anggran hanya sebatas APBN yang jumlahnya amat tidak mencukupi untuk mengawal pertahanan dan keamanan negara yang demikian luas.

Keberhasilan militer mencapai kekuasaan merupakan puncak dari suatu proses panjang dengan ciri-ciri yang menentukan penampilan yang didapatkan setelah tahun 1965. Tentara Indonesia mendapatkan orentasi politik dan kepentingan-kepentingan politik sewaktu melawan Belanda, angkatan darat dan beberapa bagian dari angkatan bersenjata lebih dalam lagi terlibat dalam politik, yang kemudian menjadikan angkatan darat sebagai unsur penentu dalam koalisi pemerintahan dan demokrasi terpimpin. Pengalaman militer dalam kegiatan non militer telah menimbulkan dua konsekuensi utama yang mempengaruhi tingkah laku politik mereka.

Pertama, perpanjangan keterlibatan akibat berlangsungnya politisasi korps perwira serta saling penetrasi dari kelompok tentara dan sipil yang mengangu kapasitas militer yang bertindak sebagai sesuatu kekuatan politik yang mempersatukan, serta menghalangi gerakan-gerakan untuk mendapatkan kekuasaan secara menyeluruh. Kedua para perwira juga telah memperoleh

keuntungan-keuntungan politik yang mereka usahakan untuk dikembangkan sebagai kekuatan politik, sudah sewajarnya tentara memperkuat posisi mereka sendiri untuk memperkuat posisi untuk mengalahkan para saingan.

Sementara monopoli perusahaan milik negara telah mulai diambil oleh militer perluasan peranan mereka dibidang ekonomi yang menimbulkan pertarungan pribadi dalam banyak perusahaan negara. Sebagai konsekuensinya adalah personel-personel militer menjadi bagian dari elit politik dan elit ekonomi dengan kepentingan untuk mempertahankan orde social yang ada, yang mereka anggap terancam baik oleh kaum komonis maupun kebijakan-kebijakan Soekarno dapat menimbulkan kekacauan.

### **C. Kekuatan Bisnis Militer**

Masuknya militer dalam bisnis sesungguhnya memiliki sejarah sendiri. Secara historis bisnis militer Indonesia muncul dan berkembang sejak masa-masa kemerdekaan. Masuknya militer ke dunia bisnis merupakan manifestasi keterlibatan militer dalam domain politik praktis. Namun, secara signifikan keterlibatan militer di segala bidang, terutama ekonomi terjadi dalam transisi dari demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin, masa ini ditandai dengan nasionalisasi perkebunan dan perusahaan dan aset Belanda.

Namun demikian, keterlibatan militer dalam bisnis mencapai puncaknya sekaligus mengalami penyimpangan dimasa Orde Baru dibawah rezim Soeharto. Pada masa itu militer memasuki disegala sendi kehidupan dengan dwifungsinya, sekian waktunya lamanya bisnis militer lalu dianggap sudah biasa, perusahaan HPH milik Yayasan Hankam, TNI (AD, AL dan AU).<sup>15</sup>

Semakin menguatnya tuntutan reformasi militer, bisnis militer kembali mendapat gugatan dan tuntutan, secara umum tuntutan dan gugatan didasarkan sejumlah persoalan. Pertama, bisnis militer secara tidak langsung akan memunculkan sikap otonomi TNI terhadap pemerintahan sipil. Bisnis militer akan tetap berpengaruh pada upaya menciptakan militer yang

---

<sup>15</sup> Lihat Firdaus Syam, Materi Perkuliahan “kekuatan-kekuatan politik” Semester II, Magister Ilmu Politik Universitas Nasional tahun 2014

professional yang memiliki nilai-nilai moral yang tidak terpengaruh ekonomi. Kedua, bisnis militer akan banyak mendistorsi pasar, setidaknya banyak pengusaha besar yang berkongsi atau bekerjasama dengan militer, keterlibatan militer dalam bisnis patut untuk dipertanyakan, karena ada kecenderungan TNI dengan menggunakan keistimewaannya untuk mempermudah bisnisnya. Ketiga, bisnis militer hanya menguntungkan perwira militer dan tidak berlaku sama dengan mensejahterakan prajurit militer.

#### **D. MILITER PADA MASA REFORMASI**

Setelah Soeharto turun dari jabatan presiden pada Mei 1998, telah terjadi tiga kali pergantian presiden di Indonesia, yaitu Habibie (1998-1999), Abdurrahman Wahid (1999-2002), Megawati (2002-2004). Masa yang oleh sebagian kalangan disebut masa reformasi ini “sempat” mendorong para pimpinan TNI untuk meninggalkan perannya di bidang politik. Menjelang 1998, tekanan yang luar biasa dilakukan oleh mahasiswa dan rakyat telah menyebabkan TNI kehilangan wibawa dan melemahkan bargaining position militer di arena politik nasional. Tuntutan terhadap TNI untuk meninggalkan arena politik tersebut nyaris saja terpenuhi. Namun, dorongan itu tidak terlalu kuat, sehingga lambat laun peranan militer dalam bidang politik kembali menguat. Ditandai dengan tampilnya Soesilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden pada Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I (2004-2009) serta Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II (2009-kini).

Mengacu pada konsep pemikiran Sundhaussen menyatakan bahwa komitmen profesionalisme militer untuk tidak memasuki bidang politik, pada era reformasi komitmen tersebut tidak terlaksanakan, sebab militer beranggapan bahwa kelompok sipil terlalu lemah dan cenderung inferior di hadapan militer. Selain itu, kelompok sipil cenderung menganggap dirinya paling benar dan paling berjasa atas turunnya Soeharto dan bergulirnya reformasi. Besarnya dukungan rakyat terhadap politisi sipil di DPR untuk menghilangkan peran politik TNI ditanggapi setengah hati. Hal tersebut nampak pada Ketetapan MPR yang hanya memutuskan bahwa anggota TNI masih diperkenankan duduk di parlemen hingga 2009. Adapun bunyi TAP

tersebut sebagai berikut: “...Keikutsertaan Tentara Nasional dalam menentukan arah kebijakan nasional disalurkan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat paling lama sampai dengan tahun 2009.”<sup>16</sup>

Apabila kita mengkaji pemikiran Huntington disini penulis menggunakan pendekatan militer sebagai prajurit praetorian, sebab ternyata TNI memang tidak menghendaki perannya di bidang politik berakhir. Oleh karena itu, TNI masih menyusun strategi-strategi untuk merebut kembali posisi politiknya yang “nyaris hilang”. Pada awal reformasi 1998, kelompok militer politik nyaris kalah secara politik. Hal ini ditandai dengan digusurnya beberapa perwira militer dari jabatan strategis. Misalnya, bupati, gubernur, menteri pertahanan, dan jabatan-jabatan lain diusahakan untuk tidak dijabat oleh militer lagi. Selain itu, nampak pula kedudukan TNI/Polri dalam lembaga perwakilan rakyat juga mulai dibatasi.

---

<sup>16</sup> Lihat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor. VII pada tahun 2000 tentang keikutsertaan TNI

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan pada Bab-bab sebelumnya maka penulis menyimpulkan bahwa adanya peranan militer dalam percaturan politik sebagai sebuah kekuatan Politik di Indonesia tidak dapat dipungkiri. Sebab sejarah mencatat bahwa militer telah terlibat dalam politik di Indonesia semenjak adanya revolusi bahkan dalam demokrasi dipimpin golongan militer telah masuk ke dalam sistem politik Indonesia.

Walaupun peran militer di parlemen telah dihapus dengan meniadakan fraksi TNI/Polri dari Dewan Perwakilan Rakyat pada masa akhir parlemen 2004, namun tidak serta menghilangkan peran militer di kancah perpolitikan nasional. Sehingga intervensi militer masih sangat terasa di era sekarang ini.

Sementara itu, intervensi militer ke dunia politik dipengaruhi oleh berbagai varian dalam intervensi politik militer, hal itu ditentukan oleh faktor-faktor diantaranya sistem kebudayaan politik, struktur politik dan institusionalnya. Namun demikian, kembalinya militer dalam bidang politik tidak dapat terelakkan sebab anggapan militer terhadap lemahnya kendali atau control kelompok sipil dan belum lagi kecenderungan kelompok sipil yang inferior di hadapan militer.

Sementara itu, munculnya militer dalam percaturan politik juga merupakan upaya untuk mengamankan kekuatan ekonomi militer dalam konteks bisnis yang dimiliki oleh elit-elit militer. Sehingga berbagai upaya diperankan oleh militer untuk mencapai tujuannya di politik demi mengamankan pengelolaan bisnis mereka. Maka munculnya eks petinggi militer di kancah politik sebagai ikon dalam pertarungan politik baik perpolitikan nasional maupun daerah dan merupakan salah satu langkah strategis untuk mengamankan kepentingan bisnis mereka,

## **B. TEMUAN**

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan diatas maka penulis menemukan ada beberapa hal yang masih dilakukan oleh militer yakni:

1. Militer masih menyusun strategi-strategi untuk merebut kembali posisi politiknya seperti zaman Orde Baru.
2. Elit Militer masih ingin menjalankan bisnis.
3. Lemahnya kendali sipil atas pemerintahan memberikan peluang bagi militer untuk kembali berkuasa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdoel, Fattah. *Demiliterisasi Tentara; Pasang Surut Politik 1945-2004*. Yogyakarta: PT Lkis Pelangi Aksara 2005
- Diamond, Larry dan Plattner (ed), Marc F. *Civil-Military Relations and Democracy*, terj Tri Wibowo Budi Santosa “Hubungan Sipil-Militer dan Konsolidasi Demokrasi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000)
- Haramain, Malik; *Gus Dur Militer dan Politik*, (Yogyakarta: LkiS, 2004)
- Huntington, Samuel P; *Prajurit dan Negara*, Terj. Deasy Sinaga (Jakarta:2003)
- Huntington, Samuel P; *The Soldier and the State: the Theory and Politics Civil – Military Relations*. Cambridge, Harvard University Press, 1957. Lihat Amos Perlmutter, *Militer dan Politik*. (Jakarta: Rajawali Pers, cetakan kedua 2000)
- Lucian Pye and Karl D. Jackson (eds.); *Political Power and Communications in Indonesia* (Berkeley : University of California Press, 1978 )
- Perlmutter, Amos; *Three Military and Politics and Modern Times*, terj. Sahat Simamora, ‘*Militer dan Politik*’, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000)
- Ulf Sandhaussen, *Politik Militer Indonesia 1945-1967 : Menuju Dwi Fungsi ABRI* , terjemahan. Hasan Basari, (Jakarta, Penerbit LP3ES, 1988)

### **Dokumen:**

- Syam, Firdaus; Materi Perkuliahan “kekuatan-kekuatan politik” Semester II, Magister Ilmu Politik Universitas Nasional tahun 2014
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor. VII pada tahun 2000 tentang keikutsertaan TNI